

Penguatan Nilai-Nilai Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme Bagi ASN Melalui Kegiatan Sosialisasi Oleh Dosen Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Edwar Juliartha¹, Suandi², Firdaus Fakh³, Yuliana⁴, Susi Lawati⁵

^{1),2),3) 4),5)} Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang

Email: edwar_juliartha@unisti.ac.id¹, suandi@unisti.ac.id², drs_firdaus@unisti.ac.id³, yuli_72@unisti.ac.id⁴, susilawati@unisti.ac.id⁵

Abstract

This socialization activity aimed to strengthen Pancasila-based leadership values and nationalism among State Civil Apparatus (ASN), particularly participants of the Leadership Training for Administrators (PKA) Batch II of 2025 in South Sumatra Province. The program was designed to instill ideological and ethical awareness in bureaucratic practices, given the vital role of ASN in maintaining the integrity and stability of public services. The implementation method employed a participatory and interactive approach, consisting of academic lectures by postgraduate lecturers from Sjakhyakirti University, focused group discussions (FGDs), as well as participant reflections and the formulation of follow-up action plans. A total of 40 ASN participants from various regional government agencies at the provincial and district/city levels across South Sumatra took part, representing diverse bureaucratic backgrounds and work experiences. The results indicate that participants experienced a significant improvement in their understanding of Pancasila and nationalism as foundational values for bureaucratic leadership. They also demonstrated a strong commitment to applying these values within their respective work environments. This activity is concluded to be an effective learning model in fostering ASN integrity and grounding national values through an educational, reflective, and contextual approach.

Keywords: Pancasila, nationalism, civil service, public leadership, bureaucratic values, socialization

Abstrak

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepemimpinan berbasis Pancasila dan nasionalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi ini dirancang untuk menanamkan kesadaran ideologis dan etis dalam praktik birokrasi, mengingat pentingnya peran ASN dalam menjaga integritas dan stabilitas pelayanan publik. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan interaktif, yang terdiri atas ceramah ilmiah oleh dosen Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta refleksi dan penyusunan rencana tindak lanjut (action plan) oleh peserta. Peserta kegiatan berjumlah 40 ASN dari berbagai perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, yang menunjukkan keragaman latar belakang birokrasi dan pengalaman kerja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme sebagai pedoman kepemimpinan birokrasi. Mereka juga menunjukkan komitmen implementatif dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan kerja. Kegiatan ini disimpulkan sebagai bentuk pembelajaran yang efektif dalam menumbuhkan integritas ASN dan membumikan nilai kebangsaan melalui pendekatan edukatif, reflektif, dan kontekstual.

Kata kunci: Pancasila, nasionalisme, ASN, kepemimpinan publik, nilai birokrasi, sosialisasi

Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan yang pluralistik, ASN tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan teknokratis, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap terpatuhi dalam setiap sendi pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan karakter ASN tidak bisa hanya bertumpu pada kompetensi teknis semata, tetapi juga harus ditopang oleh penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai ideologis bangsa, khususnya Pancasila dan semangat nasionalisme.

Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan ideologi bangsa, memberikan arah moral dan etik bagi seluruh penyelenggara negara. Sementara itu, nasionalisme menjadi pilar utama yang menjaga integritas bangsa dari potensi disintegrasi dan pengaruh ideologi transnasional yang dapat mengikis jati diri keindonesiaan. Dalam era globalisasi dan disrupsi digital saat ini, tantangan ASN semakin kompleks. Di satu sisi dituntut untuk adaptif terhadap perubahan teknologi dan sistem pemerintahan berbasis digital, di sisi lain harus mampu mempertahankan jati diri kebangsaan di tengah derasnya arus nilai-nilai luar. Kondisi ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam kepemimpinan ASN agar mereka tetap berkarakter, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan nasional.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas ASN secara holistik, Dosen Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti berinisiatif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk "*Penguatan Nilai-Nilai Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme*

bagi ASN". Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22 April 2025. Sosialisasi ini menjadi wahana penting untuk merefleksikan kembali peran ASN sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan di lingkungan birokrasi sekaligus sebagai pemimpin perubahan (*agent of change*) di masyarakat.

Peserta kegiatan terdiri dari 40 ASN yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2025. Mereka berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Kehadiran peserta dari latar belakang instansi yang beragam mencerminkan pentingnya penyebarluasan nilai-nilai dasar ini secara menyeluruh dan merata dalam sistem birokrasi. Dengan pendekatan interaktif dan kontekstual yang diberikan oleh narasumber akademik, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif serta memperkuat semangat pengabdian ASN sebagai pelayan publik yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi nasionalisme.

Adapun tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memperkuat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai ideologis dan kebangsaan dalam konteks kepemimpinan birokrasi, menanamkan integritas dan etika pelayanan publik yang berbasis Pancasila, serta membangun komitmen ASN dalam menjaga persatuan bangsa melalui tugas-tugas pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjadi bagian dari program pengembangan kompetensi, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter ASN sebagai pelayan bangsa yang berdaya saing dan berjiwa nasionalis.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan *Sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme bagi ASN* ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan interaktif, yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh peserta, baik secara kognitif maupun afektif. Metode ini dipilih untuk mendorong proses pembelajaran yang reflektif, aplikatif, dan relevan dengan konteks kerja masing-masing ASN.

Peserta kegiatan ini terdiri dari 40 ASN yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2025, yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun

Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Keragaman latar belakang instansi peserta mencerminkan pentingnya penyebaran dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara menyeluruh dan merata dalam sistem birokrasi di seluruh wilayah. Kehadiran para peserta dengan pengalaman dan tantangan birokrasi yang berbeda-beda menjadi kekayaan tersendiri dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan interaktif dan kontekstual yang diberikan oleh narasumber akademik dari Universitas Sjakhyakirti, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif serta memperkuat semangat pengabdian ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas dan berjiwa nasionalis.

Adapun kombinasi metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. **Ceramah Ilmiah Interaktif**

Narasumber dari Dosen Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti menyampaikan materi ilmiah yang membahas secara mendalam filosofi Pancasila sebagai dasar ideologis, etis, dan kultural dalam kepemimpinan ASN. Paparan ini juga menyoroti pentingnya menumbuhkan dan menjaga semangat nasionalisme di tengah tantangan birokrasi kontemporer, globalisasi nilai, serta dinamika pelayanan publik. Sesi ceramah berlangsung secara dialogis, dengan ruang terbuka untuk tanggapan dan tanya jawab dari peserta.

2. **Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD)**

Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan pengalaman empirik, kendala, serta praktik-praktik baik yang diterapkan di instansi mereka masing-masing terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Proses diskusi dipandu langsung oleh para dosen yang bertindak sebagai fasilitator dan moderator, sehingga diskusi berjalan terarah dan menghasilkan rumusan pemikiran yang aplikatif dan inspiratif.

3. **Refleksi dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)**

Sebagai tahap akhir dari proses pembelajaran, peserta diminta menyusun *action plan* secara individu. Rencana ini berisi langkah konkret mengenai bagaimana peserta akan menginternalisasikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta semangat nasionalisme dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai ASN. Penyusunan rencana ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab

personal sekaligus memperkuat komitmen kolektif sebagai bagian dari reformasi birokrasi berbasis nilai kebangsaan.

Dengan perpaduan pendekatan dan metode tersebut, kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga memperkuat integritas, etika kepemimpinan, dan kesadaran ideologis ASN sebagai pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa.



Gambar 1. Foto memaparkan materi pelatihan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Dosen Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan karakter ideologis, profesionalisme etis, serta semangat kebangsaan ASN di tengah kompleksitas birokrasi modern. Dengan melibatkan 40 peserta dari berbagai instansi pemerintahan, kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan peserta terkait makna aktual nilai Pancasila dan nasionalisme, tetapi juga membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya nilai-nilai tersebut sebagai fondasi kepemimpinan publik yang berintegritas.

Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka Post-New Public Governance (Osborne, 2010), birokrasi saat ini dituntut bukan hanya bekerja efisien, tetapi juga memelihara relasi sosial dan memperkuat nilai-nilai publik (*public values*) dalam setiap kebijakan dan tindakan. Kegiatan ini memperkuat orientasi nilai tersebut dan

memberikan ruang bagi ASN untuk merefleksikan posisi mereka tidak sekadar sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai agen ideologis negara.

1. Rekontekstualisasi Pancasila dalam Kepemimpinan ASN

Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah rekontekstualisasi Pancasila sebagai sistem nilai yang operasional dalam praktik kepemimpinan birokrasi. Dalam diskusi kelompok dan sesi reflektif, peserta menyadari bahwa Pancasila tidak boleh berhenti pada dimensi ideologis normatif, tetapi harus dibumikan dalam prosedur, keputusan, dan budaya organisasi.

Hal ini sesuai dengan konsep Value Pluralism in Public Administration (Thacher & Rein, 2004), yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan publik selalu melibatkan ketegangan antar-nilai (seperti antara efisiensi vs. keadilan, atau kecepatan vs. partisipasi). Dalam konteks ini, Pancasila menjadi penyeimbang dan penuntun dalam menavigasi dilema-dilema etis dan struktural yang dihadapi ASN.

Para peserta, misalnya, mencontohkan bagaimana sila ke-4 (kerakyatan) dapat mendorong musyawarah dalam pengambilan keputusan organisasi, sementara sila ke-2 (kemanusiaan) menggarisbawahi perlunya empati dalam pelayanan publik. Ini mencerminkan transformasi pemahaman dari Pancasila sebagai slogan menjadi instrumen reflektif dan fungsional.

2. Nasionalisme ASN: Dari Representasi Simbolik ke Praktik Kewargaan

Peserta menyatakan bahwa sebelum kegiatan ini, nasionalisme sering kali dipahami dalam bentuk simbolik: upacara, penggunaan atribut, atau peringatan hari besar. Namun setelah mengikuti kegiatan, mereka mulai memahami bahwa nasionalisme ASN seharusnya dimanifestasikan dalam bentuk etika pelayanan dan loyalitas terhadap kepentingan rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam teori Everyday Nationalism (Fox & Miller-Idriss, 2008; Goode & Stroup, 2015).

Teori ini menjelaskan bahwa nasionalisme sejati tidak hidup dalam parade atau dokumen resmi, tetapi dalam tindakan kecil yang konsisten—seperti tidak mempersulit masyarakat, tidak menyalahgunakan kewenangan, atau tidak membuat kebijakan yang menyimpang dari keadilan sosial.

Bahkan, dalam konteks ASN Indonesia yang bekerja dalam sistem yang kadang masih hierarkis dan politis, mengedepankan nasionalisme berarti berani menjaga netralitas, bersuara demi kepentingan publik, dan menolak kompromi atas prinsip negara. Inilah yang dimaksud dengan integritas sebagai manifestasi nasionalisme sipil (Huberts, 2018).

3. Penguatan Kepemimpinan ASN Berbasis Nilai (Value-Driven Leadership)

Peserta juga menyadari bahwa menjadi pemimpin ASN tidak cukup dengan penguasaan administratif, tetapi harus memiliki kesadaran nilai dan keberanian moral. Ini sejalan dengan konsep Value-Driven Public Leadership (Van Wart, 2014) yang menekankan bahwa seorang pemimpin publik adalah "penjaga nilai" (*guardian of public values*) dan harus mampu menjadi teladan dalam menjunjung keadilan, kesetaraan, dan kejujuran.

Dalam action plan yang disusun, peserta mencantumkan langkah konkret seperti: merancang forum etika organisasi, mengembangkan indikator kerja berbasis integritas, serta membuat kebijakan internal yang mendorong partisipasi dan gotong royong. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah mendorong lahirnya kepemimpinan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral dan ideologis.

Lebih jauh lagi, nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai titik temu antara prinsip birokrasi netral dengan semangat pengabdian total kepada bangsa, sebagaimana dipertegas oleh Stoker & Evans (2016) dalam teori *Political-Administrative Values Integration*, bahwa pemisahan nilai politik dan nilai etika dalam birokrasi justru melemahkan kesadaran kebangsaan.

4. Transformasi Pembelajaran ASN melalui Andragogi Kritis dan Reflektif

Efektivitas metode partisipatif dalam kegiatan ini juga sangat signifikan. Ceramah interaktif, diskusi kelompok (FGD), dan refleksi personal menjadi pendekatan yang selaras dengan Critical Andragogy (Brookfield, 2013; Zepke, 2017), yakni pendekatan pembelajaran orang dewasa yang berfokus pada pengalaman, konteks kerja, dan kesadaran kritis.

Peserta ASN bukan hanya menjadi penerima materi, melainkan aktif menilai kembali pengalaman mereka, menyadari tantangan nilai di lingkungan kerja masing-masing, serta menyusun strategi perubahan yang kontekstual. Ini menjadi indikator bahwa pelatihan telah menyentuh dimensi transformasi identitas birokrasi, dari yang semula bersifat teknokratik menjadi nilai-sentris dan responsif.

Metode ini juga terbukti menjawab kritik atas pelatihan ASN selama ini yang kerap terlalu teoritis dan kurang menyentuh realitas nilai dalam birokrasi. Dengan menghadirkan dosen perguruan tinggi yang mampu menjembatani antara ilmu dan praktik, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan akademis yang disesuaikan secara kontekstual sangat efektif untuk menumbuhkan integritas ASN secara menyeluruh.

Simpulan

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dosen Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan ini membuktikan bahwa upaya penguatan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam kepemimpinan ASN tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendesak di tengah dinamika birokrasi dan tantangan kebangsaan saat ini. Melalui pendekatan partisipatif, interaktif, dan reflektif, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif para peserta mengenai pentingnya menjadikan nilai-nilai ideologis bangsa sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan, pembentukan budaya organisasi, dan pelaksanaan pelayanan publik.

Peserta tidak hanya mengalami peningkatan literasi nilai, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata untuk menginternalisasi Pancasila sebagai sistem etika birokrasi dan nasionalisme sebagai semangat pengabdian kepada rakyat. Dengan mengacu pada teori-teori mutakhir seperti *Value-Driven Leadership*, *Public Values Governance*, dan *Everyday Nationalism*, kegiatan ini mampu menjembatani antara pemahaman teoritis dan praktik kerja birokrasi yang sarat dilema nilai dan tekanan struktural.

Selain itu, kegiatan ini mempertegas peran strategis lembaga akademik dalam memperkuat integritas ASN melalui pendekatan pembelajaran kritis yang kontekstual dan transformatif. Metode pembelajaran orang dewasa yang menekankan pengalaman dan refleksi terbukti efektif dalam membentuk pemimpin birokrasi yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga kuat secara moral dan ideologis.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi momen edukatif, tetapi juga momentum strategis untuk mendorong transformasi budaya birokrasi yang lebih berintegritas, inklusif, dan berjiwa kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. Sage Publications.
- Bozeman, B., & Johnson, J. (2015). The political economy of public values. *Public Administration Review*, 75(1), 43–52.
- Brookfield, S. D. (2013). *Teaching for Critical Thinking*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Fox, J., & Miller-Idriss, C. (2008). Everyday nationhood. *Ethnicities*, 8(4), 536–563.
- Goode, J. P., & Stroup, D. R. (2015). Everyday nationalism in unsettled times. *Europe-Asia Studies*, 67(3), 477–500.
- Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is important. *Public Integrity*, 20(S1), S18–S32.
- Kementerian PANRB. (2020). Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator. LAN Press.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Pusat Studi Pancasila UGM. (2021). *Pancasila sebagai Ideologi dan Nilai Kehidupan Berbangsa*. UGM Press.
- Stoker, G., & Evans, M. (2016). Political–administrative relations in a changing state. *Governance*, 29(1), 1–7.
- Thacher, D., & Rein, M. (2004). Managing value conflict in public policy. *Governance*, 17(4), 457–486.
- Van Wart, M. (2014). Administrative leadership theory: A reassessment after 10 years. *Public Administration*, 92(1), 1–20.
- Zepke, N. (2017). Student engagement in neo-liberal times: What is missing? *Higher Education Research & Development*, 36(2), 433–446.

